JURNAL
Vocational Education Policy

Evaluasi model CIPP atas kesesuaian dana BOSP terhadap mutu pendidikan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan

Jatu Kaannaha Putri[1]

[1]Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Korespondensi

Jatu Kaannaha Putri
putrirakajabel@gmail.com

Artikel Histori

Diajukan: 22 Mei 2026
Revisi Akhir: 12 Agustus 2026
Disetujui: 5 November 2026
Terbit: 14 November 2026

© 2026, Authors

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak

Purpose: Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terhadap mutu pendidikan vokasi, sekaligus mengurai pengalihan sistematis dana khusus kejuruan untuk menutup biaya operasional umum. **Method:** Menggunakan studi kasus evaluatif kualitatif berlandaskan model Context, Input, Process, and Product (CIPP), penelitian ini mengkaji enam SMK (satu negeri, lima swasta) di Kota Bekasi dengan 15–20 informan terpilih secara purposive. Data ditriangulasi melalui kuesioner 28 butir, wawancara semi-terstruktur, observasi bengkel praktik, dan audit dokumen anggaran (RKAS, ARKAS, Rapor Pendidikan), lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. **Findings:** Hasil penelitian menunjukkan hanya 22% dana BOSP dialokasikan untuk komponen khas vokasi (12% bahan praktik, 5% uji kompetensi, 3% kemitraan DUDI, 2% pelatihan guru), sedangkan 78% terserap untuk operasional umum. Defisit struktural sebesar Rp346.471 per siswa per tahun (pagu Rp1.300.000 berbanding biaya riil Rp1.646.471) memaksa SMK swasta memangkas pembelajaran praktik. Selain itu, empat dari enam sekolah tidak memanfaatkan Rapor Pendidikan dalam penyusunan RKAS, serta ditemukan kesenjangan tajam antara skor persepsi kepatuhan (>4,0/5,0) dan kepatuhan dokumen aktual (17–23%). **Practical & Theoretical implications:** Secara teoretis, studi ini menyempurnakan model CIPP melalui konstruk ilusi kepatuhan dan pendesakan fiskal struktural. Secara praktis, pembuat kebijakan perlu menetapkan batas minimal alokasi vokasi sebesar 30%, menyelenggarakan pelatihan literasi data bagi penyusun RKAS, dan mengintegrasikan verifikasi praktik bengkel dalam audit keuangan. **Originality/value:** Berbeda dari evaluasi fiskal makro konvensional, studi ini membedah ketimpangan tata kelola SMK negeri dan swasta untuk mengungkap bagaimana formula pendanaan per siswa yang kaku mendistorsi pembentukan kompetensi kerja di balik kepatuhan administratif semu.

Kata Kunci: Pembiayaan pendidikan vokasi; Evaluasi CIPP; Ilusi kepatuhan; Alokasi sumber daya; Tata kelola sekolah

Abstract

Purpose: *This study evaluates the alignment between School Operational Assistance (BOSP) fund utilization and vocational education quality improvement, addressing the systemic diversion of earmarked vocational grants toward routine operational overheads.* ***Method:*** *Employing a qualitative evaluative case study grounded in the Context, Input, Process, and Product (CIPP) framework, this research examined six vocational high schools (one public, five private) in Bekasi City, Indonesia, involving 15–20 purposively selected informants. Data were triangulated through a 28-item questionnaire, semi-structured interviews, non-participant workshop observations, and budget audits (RKAS, ARKAS, and Rapor Pendidikan), analyzed via Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model.* ***Findings:*** *Results reveal that only 22% of BOSP funds supported vocational-specific components (12% practice materials, 5% competency certification, 3% industry partnerships, 2% teacher training), whereas 78% funded general operations. A structural deficit of IDR 346,471 per student annually (IDR 1,300,000 grant cap versus IDR 1,646,471 actual cost) compelled private schools to curtail practical training. Furthermore, four of six schools omitted Rapor Pendidikan data from budget planning, and a stark gap emerged between perceived compliance (>4.0/5.0) and actual documentary compliance (17–23%).* ***Practical & Theoretical implications:*** *Theoretically, this study refines the CIPP model by introducing compliance illusion and structural fiscal crowding-out. Practically, policymakers should mandate a ring-fenced 30% minimum vocational allocation floor, deliver data-literacy training for budget teams, and embed substantive workshop verification into financial audits.* ***Originality/value:*** *Unlike conventional macro-fiscal evaluations, this study disaggregates public-private institutional disparities to expose how rigid per-pupil funding formulas distort classroom-level skill formation beneath superficial administrative compliance.*

Keywords: *Vocational education financing; CIPP evaluation; Compliance illusion; Resource allocation; School governance*

How to cite:

Putri, J. K.(2026). Evaluasi model CIPP atas kesesuaian dana BOSP terhadap mutu pendidikan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan. *Vocational Education Policy*, 1(2),292–314. https://doi.org/ 10.66599/wp.v1i2.42

Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi berbasis pengetahuan global kontemporer, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Vokasi (TVET) berperan sebagai katalisator utama bagi pembentukan modal manusia, daya saing industri, dan mobilitas sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Park & Yu, 2023; Qi & Wu, 2025). Dalam diskursus kebijakan pendidikan internasional, upaya memaksimalkan imbal hasil belanja publik menuntut paradigma evaluatif yang ketat untuk menelusuri bagaimana input fiskal ditransformasikan menjadi capaian pedagogis dan keterserapan pasar kerja yang nyata (Yoana et al., 2024). Berlandaskan kerangka evaluasi *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) dari Stufflebeam, penilaian program sistemik memandang efektivitas kelembagaan bukan sekadar kepatuhan prosedural, melainkan keselarasan dinamis antara kebutuhan kontekstual, alokasi sumber daya, pelaksanaan operasional, dan keluaran kualitatif (Dizon, 2023; Özden & Kuybulu, 2025). Secara epistemologis, integrasi model evaluasi berorientasi sistem ini dengan teori tata kelola sekolah membangun fondasi analitis yang kokoh untuk menguji apakah pembiayaan vokasi yang telah dialokasikan benar-benar menumbuhkan kompetensi relevan industri atau sekadar menopang pemeliharaan rutin institusi (Anhari & Said, 2026; Syarif & Sanabria, 2025).

Menyelidiki keselarasan antara pemanfaatan dana hibah operasional dan mutu pendidikan vokasi merupakan keharusan ilmiah yang mendesak dengan implikasi akademis, sosial-ekonomi, dan kelembagaan yang luas. Secara akademis dan praktis, pengungkapan distribusi sumber daya keuangan untuk bahan habis pakai bengkel, sertifikasi kompetensi, serta kemitraan industri secara langsung memperkaya kepemimpinan instruksional dan implementasi kurikulum di lingkungan belajar berbasis keterampilan (Syarif et al., 2026; Weller et al., 2025). Dari sudut pandang makroekonomi dan teknologi, kepastian bahwa dana vokasi menopang infrastruktur digital serta pelatihan praktik yang autentik sangat krusial untuk menekan angka pengangguran usia muda dan menjembatani kesenjangan keterampilan di pasar kerja yang terus berkembang pesat (Nasution et al., 2026; Yoana et al., 2024). Oleh karena itu, kegagalan dalam mengkaji mekanisme internal penganggaran sekolah kejuruan secara kritis akan menyisakan persoalan teoretis mendasar terkait konversi anggaran menjadi mutu pedagogis sekaligus melanggengkan inefisiensi operasional kronis di sistem pendidikan yang terdesentralisasi.

Literatur internasional terkini telah mengaplikasikan model CIPP secara luas untuk mengevaluasi reformasi kurikulum, transisi pembelajaran digital, dan ekosistem pelatihan profesional, yang membuktikan ketangguhannya dalam mendiagnosis hambatan sistemik (Gani & van den Berg, 2025; Li et al., 2025; Prihatiningtias et al., 2026). Pada saat yang sama, kajian pendidikan vokasi mutakhir menyoroti ketimpangan struktural dalam rezim pendanaan terpusat, dilema kepemimpinan kepala sekolah pada institusi kejuruan yang kekurangan sumber daya, serta diskoneksi persisten antara mandat

kebijakan tingkat makro dan praktik sekolah di tingkat mikro (Çolak Çakir & Cansoy, 2025; Fathulloh & Ismara, 2026; Khurniawan et al., 2026). Meskipun demikian, studi yang ada masih menyisakan titik buta empiris dan metodologis yang krusial: evaluasi pembiayaan umumnya bertumpu pada agregat fiskal makro atau kepatuhan administratif berbasis laporan mandiri, sehingga mengabaikan bagaimana defisit biaya satuan struktural memaksa sekolah—khususnya SMK swasta dengan keterbatasan sumber daya—untuk mengalihkan dana khusus vokasi demi menutup biaya operasional tetap umum (Hermawan, 2026; Pratiwi & Iswanto, 2026). Kesenjangan teoretis dan metodologis antara pelaporan anggaran formal dan pelaksanaan pedagogis substantif ini melahirkan fenomena "ilusi kepatuhan" yang belum terungkap secara memadai, sekaligus menjadi katalisator langsung bagi penelitian ini.

Berbeda dari evaluasi program konvensional yang menjadikan tingkat serapan anggaran sebagai tolok ukur tunggal efektivitas lembaga, penelitian ini memperkenalkan lensa analitis akuntabilitas ganda dalam arsitektur CIPP untuk memisahkan kepatuhan administratif dari peningkatan mutu vokasi secara substantif (Dizon, 2023; Pratiwi & Iswanto, 2026). Secara metodologis, alih-alih hanya mengandalkan survei persepsi yang kerap melambungkan klaim kinerja institusi, studi kasus evaluatif ini melakukan triangulasi atas audit rincian mata anggaran, dokumen perencanaan digital, observasi bengkel praktik, dan narasi multipemangku kepentingan di SMK negeri maupun swasta (Rocha et al., 2022). Dengan menyandingkan tata kelola institusi negeri dan swasta dalam satu ekosistem pendidikan lokal yang sama, studi ini menjembatani temuan kontradiktif dalam literatur mengenai mengapa skema hibah per kapita yang terstandar menghasilkan capaian pedagogis yang timpang antarsektor sekolah (Hermawan, 2026; Syarif & Sanabria, 2025). Pada akhirnya, desain integratif ini memajukan khazanah ilmiah kontemporer dengan membuktikan bagaimana kendala fiskal struktural memediasi penerjemahan kebijakan perencanaan berbasis data ke dalam praktik pembelajaran vokasi di ruang kelas dan bengkel kejuruan.

Guna menjembatani kesenjangan antara akuntabilitas fiskal formal dan dampak pedagogis substantif tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terhadap peningkatan mutu pendidikan vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana defisit biaya satuan kontekstual dan struktur tata kelola kelembagaan membentuk proporsi alokasi dana BOSP antara komponen operasional umum dan komponen khas vokasi. Kedua, studi ini menelusuri mengapa terjadi kesenjangan persisten antara mandat perencanaan berbasis data—khususnya integrasi Rapor Pendidikan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)—dengan realisasi anggaran aktual di SMK negeri dan swasta. Ketiga, penelitian ini menganalisis bagaimana pola alokasi sumber daya yang terbentuk tersebut memengaruhi mutu pembelajaran praktik di bengkel kejuruan, kemitraan industri, serta kesiapan kerja lulusan pada dimensi *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*.

Urgensi penyelidikan ini diperkuat oleh reformasi tata kelola pendidikan di Indonesia yang mewajibkan pelaporan keuangan terdigitalisasi melalui platform ARKAS serta penganggaran berbasis bukti yang bertumpu pada indikator mutu Rapor Pendidikan (Anhari & Said, 2026; Syarif et al., 2025). Meskipun berlokasi pada klaster sekolah kejuruan di tingkat kota, konteks empiris ini merefleksikan dilema global yang meluas dalam pembiayaan pendidikan terdesentralisasi, yakni bagaimana penyedia pendidikan vokasi swasta dan pinggiran menyiasati formula pendanaan per siswa yang kaku di tengah tuntutan standar teknologi dan industri yang terus meningkat (Çolak Çakir & Cansoy, 2025; Qi & Wu, 2025). Seiring pesatnya otomatisasi industri dan transformasi digital yang mempercepat keusangan peralatan bengkel konvensional, verifikasi mengenai apakah dana operasional yang dialokasikan benar-benar mengalir ke laboratorium praktik menjadi sangat mendesak (Fathulloh & Sutiman, 2026; Roni et al., 2026). Apabila distorsi anggaran di tingkat mikro ini dibiarkan tanpa kajian mendalam, intervensi kebijakan berisiko terus salah mendiagnosis kelangkaan sumber daya sebagai ketidakmampuan manajerial, yang pada gilirannya memperlebar ketimpangan keterampilan dan melemahkan kesiapan tenaga kerja nasional (Park & Yu, 2023; Yoana et al., 2024).

Penelitian ini menawarkan kontribusi ganda yang memperkaya teori evaluasi pendidikan sekaligus kebijakan pembiayaan sekolah vokasi. Secara teoretis, studi ini menyempurnakan model CIPP Stufflebeam dengan mengintegrasikan konstruk *ilusi kepatuhan* dan *pendesakan fiskal struktural* (*structural fiscal crowding-out*), yang menjelaskan bagaimana defisit biaya satuan pada tahap *Input* secara sistematis mendistorsi alokasi sumber daya pada tahap *Process* dan membatasi capaian kompetensi pada tahap *Product* (Dizon, 2023; Özden & Kuybulu, 2025). Secara praktis dan kebijakan, temuan ini memberikan panduan konkret bagi kementerian pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah untuk menetapkan ambang batas minimal alokasi khusus vokasi yang terlindungi, menyelenggarakan pelatihan literasi data yang terarah bagi tim penyusun RKAS, serta mengintegrasikan verifikasi pedagogis substantif ke dalam instrumen audit keuangan (Pratiwi & Iswanto, 2026; Syarif et al., 2026). Secara keseluruhan, wawasan ini memperkaya literatur internasional mengenai tata kelola sekolah kejuruan sekaligus membekali pemangku kebijakan dan pimpinan satuan pendidikan dengan cetak biru berbasis bukti untuk menyelaraskan pendanaan operasional dengan pembentukan kompetensi kerja yang autentik.

Metode Penelitian

Desain dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif (*evaluative case study*) yang dioperasionalkan melalui model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Desain studi kasus evaluatif dipilih untuk membongkar mekanisme nyata pengelolaan anggaran di tingkat satuan

pendidikan—khususnya menjelaskan bagaimana dan mengapa tekanan biaya operasional sehari-hari memengaruhi keputusan sekolah dalam mengalokasikan dana kejuruan. Penggunaan kerangka CIPP memungkinkan penelusuran keselarasan kebijakan secara menyeluruh dari hulu ke hilir: mengevaluasi kesesuaian pagu dana terhadap kebutuhan riil sekolah (*Context*), kesiapan sumber daya manusia pengelola dan kualitas penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS (*Input*), kepatuhan pelaksanaan serta pelaporan anggaran (*Process*), hingga dampak nyatanya terhadap kualitas pembelajaran praktik dan kesiapan kerja lulusan (*Product*).

Partisipan, Subjek, dan Lokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, yang terdiri atas satu SMK negeri dan lima SMK swasta. Seluruh sekolah dipilih berdasarkan empat kriteria utama: (1) menerima penyaluran dana BOSP secara rutin; (2) memiliki program keahlian vokasi; (3) menyelenggarakan pembelajaran kejuruan berbasis praktik; serta (4) memiliki dokumen perencanaan RKAS dan laporan realisasi penggunaan BOSP.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung serta otoritas fungsional subjek dalam perencanaan, pengadministrasian, maupun pemanfaatan dana BOSP di sekolah. Jumlah keseluruhan informan mencapai 15 hingga 20 orang hingga tercapai kejenuhan data (*data saturation*), yang mencakup unsur pimpinan sekolah, pengelola teknis keuangan, pelaksana pembelajaran produktif, komite sekolah, serta peserta didik pada program keahlian seperti Teknik Otomotif dan Tata Boga. Karakteristik kelembagaan keenam SMK dan distribusi informan yang relevan dengan analisis temuan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Profil Demografis dan Kesiapan Tata Kelola BOSP pada Enam SMK Subjek Penelitian

Nama Sekolah	Status	Jumlah Program Keahlian	Kelengkapan Dokumen RKAS	Pemanfaatan Aplikasi ARKAS	Karakteristik SDM & Tata Kelola BOSP
SMKN 10 Kota Bekasi	Negeri	4 Program	Lengkap	Ya	Tim pengelola terstruktur melalui SK; didukung subsidi pemerintah daerah dan cadangan fiskal skala siswa besar

SMKS Hutama Bekasi	Swasta	3 Program	Lengkap	Ya	Tim pengelola terbentuk dengan SK; menghadapi keterbatasan SDM administrasi dan tekanan biaya tetap harian
SMKS Sandikta Bekasi	Swasta	2 Program	Belum Lengkap	Ya	Keterbatasan SDM administrasi; ketergantungan tinggi pada BOSP sebagai sumber pembiayaan utama
SMKS Nurul Hikmah II	Swasta	2 Program	Belum Lengkap	Sebagian	Terjadi rangkap tugas guru sebagai pengelola teknis/operator dan keterbatasan literasi pemanfaatan Rapor Pendidikan
SMK Prima Maarif	Swasta	2 Program	Lengkap	Ya	Tim pengelola terbentuk secara struktural; penyusunan anggaran masih dibayangi defisit biaya operasional riil
SMKS Merah Putih	Swasta	1 Program	Tidak Tersedia	Tidak	Keterbatasan SDM administrasi akut; pengelolaan pelaporan digital melalui ARKAS belum berjalan

Tabel 2. Komposisi Informan Penelitian Berdasarkan Peran dan Fokus Data

Kelompok Informan	Jumlah/Komposisi	Kriteria Inklusi	Fokus Data yang Digali
Kepala Sekolah & Wakasek Kurikulum	1 Kepala Sekolah & 1 Wakasek Kurikulum	Penanggung jawab kebijakan anggaran dan keselarasan kurikulum vokasi	Arah kebijakan BOSP SMK, prioritas program, dan kemitraan DUDI
Bendahara BOSP, Operator ARKAS & Tim RKAS	1 Bendahara & 2 Tim Penyusun RKAS	Pengelola langsung pencairan, penginputan ARKAS, dan pelaporan	Rincian mata anggaran, kendala teknis ARKAS, dan pemanfaatan Rapor Pendidikan
Ketua Program Keahlian & Guru Produktif	2–3 Kaprog & 3–5 Guru Produktif	Pengampu mata pelajaran kejuruan dan pengelola bengkel/laboratorium	Kecukupan bahan praktik, pelaksanaan UKK, dan relevansi kompetensi siswa
Peserta Didik & Komite Sekolah	6–10 Peserta Didik & Perwakilan Komite	Siswa aktif kelas praktik (mis. Teknik Otomotif, Tata Boga) dan mitra pengawas	Frekuensi praktik langsung, kualitas fasilitas bengkel, dan transparansi dana

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengombinasikan empat instrumen utama yang dirancang untuk memetakan dimensi perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, dan dampak mutu secara berlapis:

- **Kuesioner Evaluasi Kesesuaian BOSP:** Instrumen terstruktur berisi 28 butir pernyataan dengan skala Likert 1–5 (1 = *Sangat Tidak Setuju* hingga 5 = *Sangat Setuju*) yang mengukur delapan variabel: profil dan kapasitas SDM pengelola (5 butir), pendataan dan pemanfaatan data (3 butir), perencanaan program dan RKAS (4 butir), pemanfaatan Rapor Pendidikan (3 butir), implementasi program (3 butir), pengelolaan anggaran dan administrasi (3 butir), pelaporan dan akuntabilitas (3 butir), serta dampak terhadap peningkatan mutu (4 butir).
- **Pedoman Wawancara Semi-Terstruktur:** Daftar pertanyaan terbuka beserta pertanyaan pendalaman (*probing*) yang terbagi ke dalam delapan tema investigasi, mencakup struktur tim pengelola, mekanisme penyusunan RKAS, interpretasi indikator Rapor Pendidikan, dukungan dana terhadap pembelajaran praktik, kendala administrasi keuangan, pengalaman pelaporan di

ARKAS, dampak terhadap kompetensi lulusan, serta rekomendasi perbaikan kebijakan.

- **Lembar Observasi Nonpartisipan dan Daftar Periksa Dokumentasi:** Instrumen pengamatan lapangan untuk menilai ketersediaan dan kondisi fisik lima aspek pembelajaran vokasi (laboratorium, bengkel/workshop praktik, ketersediaan bahan habis pakai praktik, proses pembelajaran produktif, dan *teaching factory*) serta memverifikasi kelengkapan fisik dokumen RKAS, ARKAS, laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan laporan mutu.
- **Panduan Studi Dokumentasi:** Matriks audit untuk membandingkan alokasi belanja pada dokumen internal sekolah (RKAS, ARKAS, laporan realisasi BOSP, dan Rapor Pendidikan) terhadap ketentuan regulasi eksternal dalam Petunjuk Teknis BOSP SMK Tahun 2026 serta Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen, butir kuesioner menjalani pengujian validitas dan reliabilitas sebelum didistribusikan melalui survei digital berbasis Google Form dengan acuan kategori skor rata-rata terstandar (1,00–1,80 = *Sangat Kurang* hingga 4,21–5,00 = *Sangat Baik*). Pada data kualitatif, keabsahan temuan dijaga melalui empat langkah ketat: (1) triangulasi sumber, dengan menyilangkan keterangan pimpinan sekolah dan bendahara terhadap pengalaman guru produktif serta siswa; (2) triangulasi teknik, dengan membandingkan skor persepsi pengelola pada kuesioner terhadap bukti fisik audit dokumen RKAS/ARKAS dan observasi bengkel untuk mengidentifikasi kesenjangan antara persepsi dan kepatuhan aktual; (3) *member checking*, melalui konfirmasi ringkasan hasil wawancara kepada informan kunci; serta (4) *audit trail*, berupa pengarsipan sistematis seluruh transkrip, rekaman suara, foto dokumentasi, dan salinan dokumen anggaran.

Secara operasional, pengumpulan data berlangsung pada bulan Mei 2026 melalui tiga tahapan berurutan. Tahap pertama adalah persiapan administratif dan teknis yang meliputi telaah regulasi BOSP 2026, finalisasi instrumen, serta pengurusan izin penelitian ke enam SMK di Kecamatan Pondok Melati. Tahap kedua merupakan pengumpulan data lapangan di tiap sekolah, dimulai dengan pengisian kuesioner oleh pengelola BOSP, dilanjutkan wawancara mendalam tatap muka yang direkam menggunakan perangkat perekam digital dan dicatat dalam catatan lapangan, pengamatan langsung aktivitas praktik di laboratorium/bengkel menggunakan kamera dokumentasi, serta penghimpunan salinan RKAS, ARKAS, LPJ, dan Rapor Pendidikan. Tahap ketiga adalah verifikasi dokumen dengan bendahara dan operator sekolah guna memastikan keakuratan rincian mata anggaran sebelum analisis dilakukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang dijalankan secara siklikal di antara empat alur kerja utama:

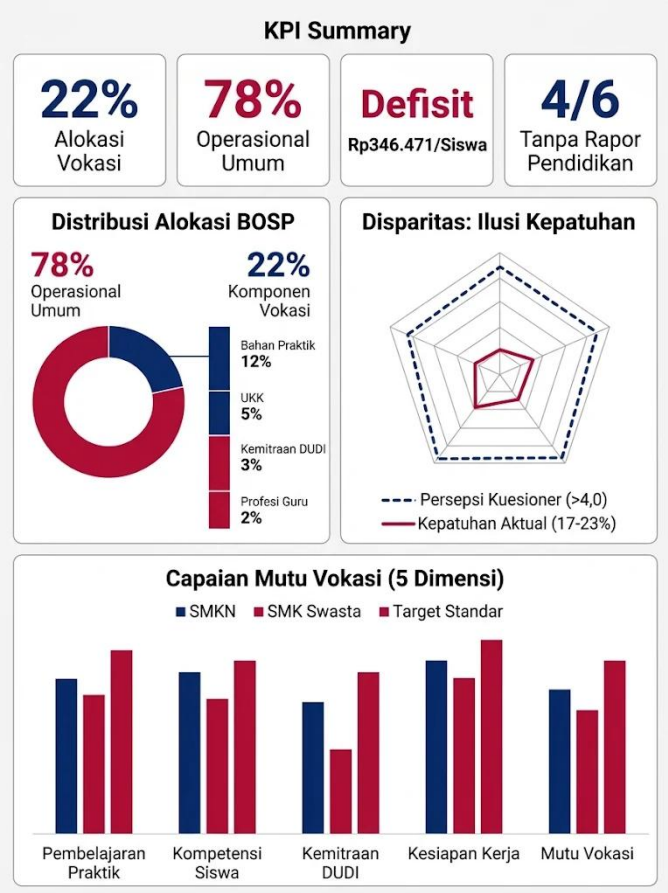
1. **Pengumpulan Data (*Data Collection*):** Seluruh data mentah dari hasil wawancara, lembar observasi bengkel, respons kuesioner, dan arsip dokumen anggaran dikumpulkan serta diberi kode identitas berdasarkan masing-masing sekolah.
2. **Kondensasi Data (*Data Condensation*):** Peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengodekan kutipan transkrip wawancara serta catatan observasi ke dalam empat kategori evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Secara spesifik pada data dokumen RKAS dan laporan realisasi BOSP, seluruh mata anggaran diklasifikasikan secara biner ke dalam dua kelompok analisis: **komponen operasional umum** (honorarium, alat tulis kantor, layanan daya dan jasa seperti listrik/air, serta pemeliharaan sarana umum) dan **komponen khas vokasi** (bahan praktik kejuruan, uji kompetensi keahlian/UKK, kemitraan DUDI/PKL, serta pengembangan profesi guru produktif).
3. **Penyajian Data (*Data Display*):** Data yang telah dikondensasikan dipetakan ke dalam matriks temuan lintas dimensi CIPP dan tabel perbandingan distribusi anggaran antar-enam SMK. Pada lapisan data kuantitatif pendukung, peneliti menghitung persentase rata-rata alokasi komponen vokasi terhadap total BOSP, menghitung selisih defisit struktural antara pagu BOSP per siswa (Rp1.300.000/tahun) dan biaya operasional riil (Rp1.646.471/siswa), serta menyandingkan skor rata-rata persepsi kuesioner (skala 1–5) dengan persentase kelengkapan dokumen aktual hasil observasi untuk mendeteksi fenomena ilusi kepatuhan.
4. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*):** Peneliti merumuskan pola keterkaitan kausal antara keterbatasan fiskal, praktik penyusunan RKAS, dan mutu pembelajaran praktik, kemudian memverifikasi ketepatan kesimpulan tersebut melalui pengecekan silang berulang terhadap bukti dokumen dan hasil observasi di seluruh sekolah.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan **Google Form** untuk penghimpunan data kuesioner digital, perangkat lunak lembar kerja (*spreadsheet*) dan pengolah kata pada laptop untuk menghitung distribusi persentase alokasi mata anggaran serta menyusun matriks perbandingan lintas kasus, serta melakukan penelaahan langsung terhadap data perencanaan dan pelaporan digital pada aplikasi **ARKAS** dan platform **Rapor Pendidikan** milik satuan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi kesesuaian penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi—yang mencakup

SMKN 10 Kota Bekasi sebagai sekolah negeri serta lima SMK swasta (SMKS Hutama Bekasi, SMKS Sandikta Bekasi, SMKS Nurul Hikmah II, SMK Prima Maarif, dan SMKS Merah Putih)—disajikan secara terpadu antara temuan empiris dan sintesis analisis mengikuti kerangka model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Peta menyeluruh temuan lintas dimensi evaluasi tersebut dirangkum secara visual pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Infografik Tiga Panel Evaluasi Kesesuaian Dana BOSP pada SMK

Panel atas menampilkan indikator kunci temuan (22% alokasi komponen vokasi, defisit struktural Rp346.471 per siswa, serta rendahnya pemanfaatan Rapor Pendidikan); panel tengah kiri memperlihatkan perbandingan distribusi anggaran antara operasional umum (78%, merah) dan khas vokasi (22%, biru); panel tengah kanan menampilkan grafik radar disparitas antara skor persepsi kuesioner (>4,0) dan kepatuhan aktual dokumen (17–23%); panel bawah membandingkan capaian mutu lima dimensi antara SMKN, SMK swasta, dan target standar.

Evaluasi Konteks (*Context*): Defisit Struktural Pagu BOSP dan Kerentanan Fiskal SMK Swasta

Hasil studi dokumentasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan laporan realisasi BOSP menunjukkan bahwa keenam SMK subjek penelitian menerima penyaluran dana BOSP

secara rutin, dengan alokasi rata-rata pada kelima SMK swasta sebesar Rp1.300.000 per siswa per tahun. Merujuk data advokasi nasional (Kemendikdasmen, 2026), besaran pagu tersebut berada di bawah total biaya riil operasional sekolah yang mencapai Rp1.646.471 per siswa per tahun, sehingga menciptakan defisit struktural sebesar Rp346.471 per siswa (**Gambar 1**, panel atas). Bagi SMK swasta yang memiliki jumlah peserta didik lebih kecil dibandingkan SMK negeri serta tidak memperoleh subsidi silang atau bantuan operasional daerah yang setara, tekanan defisit ini menimbulkan kerentanan fiskal sistemik bahkan sebelum sekolah memperhitungkan kebutuhan khas kejuruan seperti bahan habis pakai bengkel dan pemutakhiran peralatan praktik. Melalui wawancara mendalam sebagaimana didokumentasikan pada **Gambar 2**, pimpinan sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyatakan telah mengetahui arahan kebijakan BOSP SMK untuk mendukung pembelajaran praktik dan kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), namun pemahaman mendalam mengenai diferensiasi alokasi antara BOSP SMK dan BOSP reguler masih terbatas, terutama di kalangan bendahara dan tim penyusun RKAS sekolah swasta.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Mendalam dengan Pimpinan dan Pengelola BOSP Sekolah

Dalam perspektif komparatif, kerentanan fiskal yang dialami SMK swasta di Pondok Melati memperlihatkan kesenjangan struktural yang nyata dibandingkan SMK negeri yang ditopang subsidi pemerintah daerah serta skala ekonomi peserta didik yang besar. Kondisi ini mengonfirmasi argumen teoretis Barr (2012) bahwa kualitas layanan pendidikan tidak dapat dioptimalkan tanpa kecukupan pembiayaan dasar. Secara empiris, penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2026) yang menyoroti kerentanan sumber daya pada sekolah vokasi swasta di Indonesia, serta mendukung penelitian Syarif dan Sanabria (2025) mengenai urgensi kepemimpinan berkelanjutan (*sustainable*

leadership) dalam membangun ketahanan organisasi (*school resilience*) di tengah keterbatasan fiskal. Pada tataran internasional, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Çolak Çakir dan Cansoy (2025) di Turki yang mengungkap dilema kepala sekolah kejuruan dalam sistem pendidikan terpusat ketika menghadapi formula pendanaan per kapita yang kaku. Sebaliknya, realitas defisit pada SMK swasta ini kontras dengan model pembiayaan sekolah vokasi unggulan di luar negeri, seperti penelitian Park dan Yu (2023) mengenai *Meister High School* di Korea Selatan dan penelitian Qi dan Wu (2025) di Tiongkok, di mana pendanaan pemerintah secara eksplisit mengisolasi kebutuhan peralatan bengkel berteknologi tinggi dari tekanan biaya operasional umum. Kontribusi teoretis dari analisis dimensi *Context* ini adalah perlunya memasukkan variabel status kelembagaan (negeri versus swasta) dan skala ekonomi siswa sebagai determinan utama dalam evaluasi pembiayaan model CIPP (Dizon, 2023). Secara praktis, hasil ini menggarisbawahi urgensi skema afirmasi pembiayaan atau pembentukan fasilitas bengkel bersama (*shared vocational hub*) bagi klaster SMK swasta skala kecil agar defisit biaya satuan tidak terus dikompensasi dengan memangkas anggaran praktik siswa.

Evaluasi Masukan (*Input*): Kapasitas SDM, *Mismatch* Alokasi Anggaran, dan Pemanfaatan Rapor Pendidikan

Pada komponen sumber daya manusia (SDM), seluruh sekolah telah membentuk tim pengelola BOSP secara formal melalui Surat Keputusan (SK) kepala sekolah yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, wakil kepala sekolah, dan operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Namun, penelusuran teknis di lapangan (**Gambar 3**) mengungkap bahwa pada 3 dari 5 SMK swasta terjadi rangkap tugas, di mana guru mata pelajaran merangkap jabatan sebagai bendahara atau operator ARKAS. Rangkap jabatan tersebut memicu beban kerja administratif yang tinggi, ketergantungan pada satu operator tunggal, serta potensi ketidakakuratan penginputan data perencanaan maupun pelaporan.



Gambar 3. Dokumentasi Penggalian Data dan Diskusi Teknis Bersama Tim Pengelola Sekolah

Dari sisi struktur perencanaan anggaran, audit dokumen RKAS membuktikan bahwa alokasi dana untuk komponen khas vokasi—meliputi bahan praktik kejuruan, uji kompetensi keahlian (UKK), kemitraan DUDI/PKL, dan pengembangan profesi guru produktif—rata-rata hanya mencapai 18–24% (rerata 22%) dari total anggaran BOSP. Sebaliknya, sebesar 76–82% (rerata 78%) terserap untuk komponen operasional umum yang tidak berbeda dengan pola penganggaran sekolah menengah umum (**Tabel 3** dan **Gambar 1**, panel tengah kiri). Selain itu, 4 dari 6 sekolah menyusun RKAS dengan menyalin pola anggaran tahun sebelumnya (*copy-paste*) tanpa memanfaatkan indikator mutu pada Rapor Pendidikan, meskipun regulasi BOSP 2026 mewajibkan perencanaan berbasis data mutu. Pola tersebut terkonfirmasi melalui keterangan bendahara sekolah berikut:

> *"RKAS kami sebagian besar ikut tahun lalu, karena kami tidak tahu cara baca Rapor Pendidikan untuk menentukan prioritas. Tidak ada pelatihan khusus untuk itu."* — Bendahara SMK Swasta

Tabel 3. Distribusi Rata-rata Alokasi Dana BOSP per Komponen pada Enam SMK

Komponen Penggunaan	**Rata-rata Alokasi (%)**	**Kategori Anggaran**
Honorarium dan Alat Tulis Kantor (ATK)	38%	Operasional Umum
Layanan daya dan jasa (listrik, air, internet)	22%	Operasional Umum
Pemeliharaan sarana dan prasarana umum	18%	Operasional Umum
Bahan praktik kejuruan	12%	Khas Vokasi
Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	5%	Khas Vokasi
Kemitraan DUDI / Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3%	Khas Vokasi
Pengembangan profesi guru produktif	2%	Khas Vokasi
Total Alokasi Anggaran BOSP	**100%**	**78% Umum : 22% Vokasi**

Dominasi belanja operasional umum hingga 78% memperlihatkan terjadinya *mismatch* orientasi penggunaan dana, yakni bergesernya BOSP SMK menjadi pola BOSP sekolah umum. Fenomena ini didorong oleh tekanan biaya tetap (*fixed cost*) nasional yang menyumbang 82% dari biaya operasional riil sekolah serta lemahnya literasi data tim penyusun RKAS dalam menerjemahkan Rapor Pendidikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fathulloh dan Ismara (2026) serta Khurniawan et al. (2026) yang mengidentifikasi kesenjangan persisten antara kebijakan revitalisasi vokasi di tingkat pusat dan kapasitas penganggaran di tingkat sekolah. Terkait beban SDM pengelola, temuan rangkap tugas guru sebagai bendahara dan operator ARKAS sejalan dengan penelitian Weller et al. (2025) yang memperingatkan bahwa beban administratif berlebih berisiko menggerus identitas profesional dan fokus pedagogis guru kejuruan. Lebih lanjut, ketidakmampuan sekolah memanfaatkan Rapor Pendidikan dalam penyusunan RKAS sejalan dengan penelitian Syarif et al. (2025) tentang tantangan kepemimpinan adaptif dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional, penelitian Syarif et al. (2026) mengenai peran krusial kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam menggerakkan perbaikan mutu berbasis data, serta

penelitian Fathulloh dan Sutiman (2026) terkait kesenjangan literasi digital pemimpin pendidikan vokasi. Secara teoretis, analisis dimensi *Input* ini memperkaya model CIPP (Özden & Kuybulu, 2025) dengan merumuskan mekanisme *pendesakan fiskal struktural* (*structural fiscal crowding-out*), di mana komponen biaya tetap yang tidak terhindarkan mendesak pos belanja kejuruan sebelum proses pembelajaran dimulai. Secara praktis, pembuat kebijakan perlu memisahkan alokasi pagu operasional dasar dari pagu khusus praktik kejuruan serta menyelenggarakan bimbingan teknis klinis literasi data Rapor Pendidikan bagi tim penyusun RKAS.

Evaluasi Proses (*Process*): Dinamika Pelaksanaan, Keterlambatan Pencairan, dan Ilusi Kepatuhan

Secara prosedural, pelaksanaan BOSP di keenam sekolah telah mengikuti tahapan petunjuk teknis mulai dari penyusunan RKAS, penginputan ke ARKAS, pencairan bertahap, hingga pelaporan. Namun, triangulasi teknik melalui observasi fisik arsip (**Gambar 4**), verifikasi digital ARKAS (**Gambar 5**), kuesioner, dan wawancara mengungkap tiga hambatan kritis dalam proses pelaksanaan:

1. **Keterlambatan Pencairan Dana:** Seluruh SMK swasta mengalami keterlambatan pencairan dana yang menunda atau membatalkan kegiatan praktik pada triwulan pertama karena sekolah tidak memiliki cadangan kas mandiri. Ketika arus kas tertekan, belanja khas vokasi seperti bahan praktik, kunjungan industri, dan *teaching factory* menjadi pos pertama yang dipangkas, sebagaimana tercermin dari pernyataan pimpinan sekolah berikut:
   "Kami sudah coba arahkan dana ke praktik, tapi honorarium dan listrik itu tidak bisa dikurangi. Kalau tidak dibayar, operasional berhenti. Akhirnya yang kena potong ya bahan praktik." — Kepala Sekolah (SMKN 10)

2. **Ketidaklengkapan Dokumen Fisik dan Klasifikasi ARKAS:** Observasi lapangan menunjukkan sekitar 1 dari 3 sekolah memiliki masalah kelengkapan dokumen fisik pelaksanaan (Gambar 4). Di sisi lain, sistem pelaporan digital ARKAS (Gambar 5) belum menyediakan pemantauan terpisah untuk kegiatan khas vokasi sehingga alokasi praktik mudah tergeser oleh kebutuhan operasional rutin.

3. **Disparitas Persepsi dan Kepatuhan Aktual:** Penyilangan antara skor kuesioner pengelola dan hasil audit dokumen memperlihatkan kesenjangan tajam: rata-rata skor persepsi responden berada di atas 4,0 (kategori *Baik* hingga *Sangat Baik* pada skala 1–5), sementara skor kepatuhan aktual berdasarkan observasi kelengkapan dokumen hanya mencapai 17–23% (**Gambar 1**, panel

tengah kanan).



[Gambar 4. Dokumentasi Observasi Fisik Penyimpanan Arsip Administrasi dan Sarana Pembelajaran] Keterangan: Observasi nonpartisipan terhadap tata kelola penyimpanan arsip fisik dokumen sekolah, berkas pertanggungjawaban, dan perlengkapan pendukung kegiatan siswa.



[Gambar 5. Dokumentasi Verifikasi Dokumen RKAS dan Pelaporan Digital ARKAS Bersama Bendahara dan Operator] Keterangan: Verifikasi silang rincian mata anggaran RKAS dan laporan realisasi digital pada sistem ARKAS bersama bendahara dan operator sekolah.

Kesenjangan ekstrem antara kepatuhan prosedural di atas kertas (skor persepsi >4,0 dan laporan ARKAS yang rapi) dengan rendahnya pemenuhan substantif di lapangan (17–23%) dikonseptualisasikan sebagai *ilusi kepatuhan* (*compliance illusion*). Fenomena ini merupakan respons rasional sekolah dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan beban administrasi, tetapi berisiko menghasilkan overestimasi mutu pengelolaan dana. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Iswanto (2026) yang membuktikan bahwa supervisi pendidikan yang berfokus pada kelengkapan administratif sering kali gagal mendorong peningkatan kinerja pedagogis yang substantif. Temuan mengenai keterbatasan pengawasan melalui aplikasi ARKAS juga melengkapi penelitian Anhari dan Said (2026) tentang transformasi digital tata kelola sekolah, dengan menunjukkan bahwa digitalisasi

pelaporan keuangan tanpa indikator ketercapaian mutu hanya memindahkan kepatuhan formal dari dokumen fisik ke sistem daring. Dalam konteks evaluasi program internasional, hasil ini sejalan dengan penelitian Gani dan van den Berg (2025) serta Li et al. (2025) yang menegaskan bahwa evaluasi berbasis CIPP wajib memadukan audit dokumen dengan verifikasi lapangan guna mengeliminasi bias pelaporan mandiri. Secara teoretis, konsep *ilusi kepatuhan* menyempurnakan teori akuntabilitas pendidikan dengan membedakan secara tegas antara akuntabilitas administratif-fiskal dan akuntabilitas substantif-pedagogis. Secara praktis, pengawas sekolah dan auditor BOSP perlu menyertakan instrumen verifikasi lapangan atas ketersediaan bahan praktik dan keterlaksanaan program kejuruan dalam audit BOSP.

Evaluasi Produk (*Product*): Dampak terhadap Pembelajaran Praktik, Kemitraan DUDI, dan Kesiapan Kerja Lulusan

Observasi nonpartisipan pada laboratorium dan bengkel kejuruan memperlihatkan perbedaan kualitas layanan praktik yang mencolok antara SMK negeri dan SMK swasta. SMKN 10 Kota Bekasi memiliki fasilitas bengkel yang lebih memadai dengan pasokan bahan habis pakai praktik secara reguler. Sebaliknya, pada 4 dari 5 SMK swasta, keterbatasan bahan praktik menyebabkan frekuensi praktik per siswa berada di bawah standar kurikulum. Peserta didik dari program keahlian Teknik Otomotif dan Tata Boga menuturkan bahwa kegiatan praktik langsung kerap digantikan oleh metode demonstrasi guru di depan kelas tanpa keterlibatan aktif setiap siswa akibat minimnya bahan tersedia. Sintesis temuan dan implikasinya pada lima dimensi mutu vokasi disajikan pada **Tabel 4** dan **Tabel 5**, serta dirangkum secara visual pada **Gambar 1** (panel bawah).

Tabel 4. Matriks Temuan Utama Penelitian Lintas Dimensi Evaluasi

Dimensi Evaluasi	Temuan Empiris Utama	Sumber Data	Implikasi terhadap Mutu Vokasi
Pembelajaran	Bahan praktik terbatas; frekuensi praktik siswa di bawah standar kurikulum	Observasi bengkel, wawancara siswa	Kompetensi psikomotorik peserta didik tidak berkembang optimal
Kompetensi Siswa	Kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan standar DUDI	Wawancara guru produktif dan kaprog	Kesiapan kerja lulusan belum memadai untuk bersaing di pasar kerja
Kemitraan DUDI	Program PKL kurang terstruktur; alokasi fasilitasi MoU industri hanya 3%	Studi dokumen RKAS, wawancara wakasek	Pelaksanaan PKL cenderung formalitas tanpa sinkronisasi kurikulum
Perencanaan	RKAS tidak berbasis Rapor	Dokumen RKAS,	Alokasi anggaran tidak

	Pendidikan (4 dari 6 sekolah menyalin pola lama)	ARKAS, Rapor Pendidikan	mencerminkan prioritas bidang keahlian SMK
Pelaporan	Laporan realisasi lengkap secara administratif, tetapi minim indikator dampak mutu	Dokumen LPJ, ARKAS, kuesioner	Akuntabilitas administratif tinggi, namun akuntabilitas substantif rendah

Tabel 5. Pemetaan Dampak Penggunaan Dana BOSP dalam Lima Dimensi Mutu Vokasi

Dimensi Mutu	**Kondisi Nyata di Lapangan**	**Implikasi Spesifik bagi SMK di Pondok Melati**
Pembelajaran praktik	Pemanfaatan Rapor Pendidikan hanya 60,87% lengkap; 16,67% belum tersedia	Perencanaan program praktik tidak berbasis data mutu; bahan praktik tidak dialokasikan secara proporsional
Kompetensi siswa	Skor kuesioner indikator peningkatan kompetensi berada pada kategori sedang (zona kuning)	Potensi kesenjangan yang lebar antara standar kompetensi industri dan keahlian lulusan SMK swasta
Kemitraan DUDI	Tidak termonitor secara spesifik dalam instrumen pengawasan rutin	Minimnya alokasi RKAS khusus untuk penyelarasan kurikulum, magang guru, dan fasilitasi MoU industri
Kesiapan kerja lulusan	Belum diukur secara terintegrasi dalam evaluasi serapan anggaran BOSP	Diperlukan integrasi pelacakan tamatan (*tracer study*) pada Rapor Pendidikan untuk mengukur keterserapan kerja
Mutu vokasi secara umum	Disparitas tajam antara persepsi kuesioner (>4,0) dan kepatuhan dokumen aktual (17–23%)	SMK swasta berisiko mengalami overestimasi mutu pengelolaan BOSP tanpa audit substantif di lapangan

Pergeseran metode pembelajaran kejuruan dari praktik langsung (*hands-on learning*) menjadi demonstrasi guru akibat minimnya bahan habis pakai menghambat pencapaian kompetensi psikomotorik siswa sesuai standar Skema Sertifikasi Kompetensi. Kondisi ini diperparah oleh alokasi kemitraan DUDI yang hanya mencapai rata-rata 3%, sehingga sinkronisasi kurikulum dan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) berjalan tanpa dukungan pendanaan yang memadai (Khurniawan & Adi, 2024). Dampak berantai pada dimensi *Product* ini sejalan dengan penelitian Yoana et al. (2024) yang membuktikan bahwa tanpa dukungan kualitas pembelajaran praktik dan relevansi industri yang memadai, pendidikan vokasi di Indonesia belum optimal dalam menekan tingkat pengangguran terbuka lulusan sekolah menengah. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Muhtar et al. (2026), Nasution et al. (2026), dan Roni et al. (2026) yang menegaskan bahwa penguasaan keterampilan teknis siswa SMK sangat bergantung pada

ketersediaan model pembelajaran berbasis proyek, media digital interaktif, dan simulasi teknologi bengkel yang semuanya mensyaratkan alokasi anggaran operasional yang memadai. Secara teoretis, hasil pada dimensi *Product* ini memvalidasi keterkaitan kausal antardimensi dalam model CIPP (Rocha et al., 2022; Dizon, 2023), di mana distorsi pembiayaan pada tahap *Input* dan *Process* secara sistemik membatasi mutu keluaran lulusan. Secara praktis, satuan pendidikan perlu merealokasikan belanja kejuruan menuju pengadaan bahan habis pakai praktik, penguatan kemitraan DUDI, serta integrasi data pelacakan tamatan (*tracer study*) dalam evaluasi tahunan RKAS.

Kerangka Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis keseluruhan temuan evaluasi CIPP di atas, dirumuskan tiga intervensi kebijakan strategis untuk mengembalikan orientasi penggunaan dana BOSP pada peningkatan mutu pendidikan vokasi sebagaimana terangkum dalam **Tabel 6**.

Tabel 6. Kerangka Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesesuaian Dana BOSP SMK

Cakupan Intervensi	Rekomendasi Kebijakan Operasional	Sasaran Pelaksana
Regulasi Pembiayaan	Penerbitan petunjuk teknis BOSP SMK dengan penetapan batas bawah (*floor*) alokasi minimal 30% khusus untuk komponen bidang keahlian kejuruan/vokasi yang diverifikasi secara fisik	Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi
Kapasitas SDM & Perencanaan	Penyelenggaraan pelatihan intensif dan pendampingan klinis pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk penyusunan RKAS berbasis mutu, khususnya bagi bendahara dan tim RKAS SMK swasta	Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Pengawas Pembina
Sistem Akuntabilitas & Supervisi	Penambahan instrumen verifikasi substantif dalam supervisi dan audit BOSP yang tidak hanya memeriksa kelengkapan kuitansi, tetapi juga memverifikasi ketercapaian indikator praktik vokasi	Pengawas Sekolah dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)

Meskipun penelitian ini berhasil membongkar mekanisme mikro penganggaran dan merumuskan konsep *ilusi kepatuhan* serta *pendesakan fiskal struktural* pada SMK, terdapat beberapa keterbatasan metodologis maupun praktis yang memengaruhi cakupan generalisasi hasilnya. Pertama, dari sisi desain studi kasus evaluatif dan ukuran sampel, investigasi ini berfokus pada enam SMK (satu sekolah negeri dan lima sekolah swasta) dalam satu klaster wilayah administratif di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Variasi besaran bantuan operasional daerah (BOFD) dan struktur biaya satuan antarprovinsi di

Indonesia membatasi generalisasi statistik temuan ini ke seluruh wilayah nasional tanpa penyesuaian konteks fiskal lokal. Kedua, dari sisi durasi pengumpulan data yang dilakukan secara lintas waktu (*cross-sectional*) pada bulan Mei 2026, studi ini menangkap dinamika penyusunan dan realisasi anggaran dalam satu siklus tahun berjalan sehingga belum mengukur dampak jangka panjang perubahan alokasi RKAS terhadap keterserapan kerja lulusan secara longitudinal melalui *tracer study*. Ketiga, dari sisi operasional lapangan, ketidaklengkapan dokumen RKAS dan belum optimalnya penggunaan aplikasi ARKAS pada sebagian SMK swasta (seperti pada SMKS Merah Putih dan SMKS Nurul Hikmah II) serta tingginya beban rangkap tugas administrator sekolah membatasi ketersediaan data rincian belanja historis yang seragam di seluruh unit analisis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan menggunakan desain metode campuran (*mixed methods*) dengan cakupan sampel lintas kabupaten/kota yang lebih luas serta pelacakan longitudinal keterserapan lulusan guna menguji pengaruh kuantitatif rasio belanja vokasi terhadap daya saing alumni di dunia kerja.

Kesimpulan

Evaluasi model CIPP pada enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi membuktikan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) belum selaras secara optimal dengan peningkatan mutu pendidikan vokasi. Secara garis besar, penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan utama: (1) terjadinya ketimpangan alokasi anggaran dengan rata-rata hanya 22% dana BOSP yang diarahkan pada komponen khas vokasi, sedangkan 78% terserap untuk operasional umum; (2) munculnya defisit struktural sebesar Rp346.471 per siswa per tahun yang menekan kelangsungan pembiayaan praktik pada SMK swasta; (3) rendahnya perencanaan berbasis data mutu karena 4 dari 6 sekolah belum memanfaatkan Rapor Pendidikan dalam penyusunan RKAS; serta (4) timbulnya fenomena *ilusi kepatuhan*, yakni disparitas tajam antara tingginya skor persepsi kepatuhan (>4,0) dan rendahnya kelengkapan bukti substantif di lapangan (17–23%).

Ketidakselarasan tersebut terbentuk melalui mekanisme pendesakan fiskal struktural yang berantai dari dimensi masukan (*Input*) hingga keluaran (*Product*). Pagu BOSP sebesar Rp1.300.000 per siswa berada di bawah biaya operasional riil sekolah sebesar Rp1.646.471 per siswa, sehingga mendorong pengelola SMK swasta yang tidak memiliki subsidi pemerintah daerah maupun cadangan fiskal besar untuk memprioritaskan biaya tetap wajib—seperti honorarium dan tagihan utilitas—dan memangkas pos fleksibel seperti bahan praktik kejuruan serta kemitraan DUDI. Dinamika ini diperkuat oleh keterbatasan literasi data tim penyusun RKAS dalam menerjemahkan indikator Rapor Pendidikan menjadi program kejuruan, serta sistem pelaporan digital ARKAS yang baru memverifikasi kepatuhan prosedural-administratif tanpa mengukur ketercapaian praktik di bengkel. Akibatnya, pembelajaran produktif bergeser dari praktik langsung menjadi demonstrasi guru yang menghambat penguasaan

kompetensi psikomotorik dan kesiapan kerja lulusan.

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang berfokus pada studi kasus evaluatif lintas waktu (*cross-sectional*) terhadap enam SMK dalam satu klaster kecamatan serta keterbatasan kelengkapan arsip historis pada sebagian SMK swasta, penelitian lanjutan perlu memperluas rancangan metodologis dan jangkauan empirisnya. Studi di masa depan direkomendasikan menggunakan desain metode campuran (*mixed methods*) dengan cakupan sampel lintas kabupaten/kota yang lebih luas untuk menangkap variasi dukungan pembiayaan daerah antarwilayah. Selain itu, penelitian berikutnya perlu mengintegrasikan data pelacakan tamatan (*tracer study*) secara longitudinal guna menguji secara kuantitatif pengaruh rasio belanja komponen vokasi terhadap tingkat keterserapan dan daya saing lulusan di pasar kerja.

Dalam visi jangka panjang, pembaruan tata kelola pembiayaan pendidikan vokasi diharapkan mampu mentransformasi pengelolaan dana operasional sekolah dari sekadar pemenuhan kepatuhan administratif menjadi investasi pedagogis yang substantif dan berorientasi dampak. Sinergi antara regulasi batas bawah alokasi kejuruan, pendampingan literasi data bagi penyusun anggaran, serta audit substantif berbasis capaian mutu akan memastikan dana publik benar-benar menopang pembelajaran praktik yang selaras dengan kebutuhan industri. Pada akhirnya, ekosistem pembiayaan sekolah vokasi yang berkeadilan dan akuntabel menjadi fondasi strategis untuk menutup kesenjangan keterampilan lulusan, menekan angka pengangguran tenaga kerja muda, dan memperkuat daya saing sumber daya manusia nasional di tengah transformasi ekonomi dan teknologi global.

Referensi

Alam, S., Matthews, J., Sterling, R., Allouche, E., Selvakumar, A., Condit, W., ... Downey, D. (2018). Evaluation of testing methods for tracking CIPP liners' life-cycle performance. *Cogent Engineering*, *5*(1). https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1463594

Al-Khathami, A. D. (2012). Evaluation of Saudi family medicine training program: The application of CIPP evaluation format. *Medical Teacher*, *34*(sup1), S81–S89. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.656752

Anhari, T., & Said, A. (2026). Enhancing digital transformation capacity of educators to optimize school governance. *Hamka Insight*, *6*(1), 1–20. https://doi.org/10.51574/hamka.v6i1.198

Çolak Çakir, T., & Cansoy, R. (2025). Challenges of being a principal in vocational high schools perceived as "a last chance": An examination in a centralized education system. *Leadership and Policy in Schools*, 1–28. https://doi.org/10.1080/15700763.2025.2493727

Dizon, A. G. (2023). Historical development of CIPP as a curriculum evaluation model. *History of Education*, *52*(1), 109–128. https://doi.org/10.1080/0046760X.2022.2098390

Fathulloh, M. Z., & Ismara, K. I. (2026). Menjembatani kebijakan dan praktik: Tinjauan sistematis kesenjangan penelitian TVET menuju pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 112–125. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.26

Fathulloh, M. Z., & Sutiman. (2026). Kepemimpinan pendidikan vokasi era digital: Systematic review dampak mutu dan kompetensi. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 98–111. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.34

Gani, F., & van den Berg, G. (2025). Evaluating an online programme review process in open distance learning: A case study using the CIPP model. *Africa Education Review*, *21*(2), 79–95. https://doi.org/10.1080/18146627.2025.2547618

Gilberg, J. A., & Scholwinski, E. (1983). Improving the utility of school psychological reports through evaluation using Stufflebeam's CIPP model. *School Psychology Review*, *12*(3), 346–350. https://doi.org/10.1080/02796015.1983.12085050

Hermawan, A. (2026). Memperkuat kepemimpinan pelayan di sekolah vokasi swasta: Pendekatan POP-SDM. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 76–97. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.13

Kafi, Z., Motallebzadeh, K., Khodabakhshzadeh, H., & Zeraatpisheh, M. (2019). Developing, glocalizing & validating a quality indices rubric in English language teaching: A case of CIPP model. *Cogent Education*, *6*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1666643

Khurniawan, A. W., Erda, G., Tengku Irfan Wira, B., Tengku, A., Arisman, A., Susilawati, S., & Miftahus, S. (2026). Klasterisasi profil sekolah penerima bantuan revitalisasi SMK 2025 berbasis K-Medoids dan Gower Distance. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 1–19. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.40

Li, X., Ni, Q., Zhou, J., Pang, S., Zhu, Y., & Song, W. (2025). Application of multidisciplinary

collaborative education in general clinical training based on the CIPP model: A comparative study. *Critical Public Health*, *35*(1). https://doi.org/10.1080/09581596.2025.2579364

Molope, M., & Oduaran, A. (2020). Evaluation of the community development practitioners' professional development programme: CIPP model application. *Development in Practice*, *30*(2), 194–206. https://doi.org/10.1080/09614524.2019.1650894

Muhtar, Suryanti, & Musahrain, M. (2026). Tahap persiapan pengembangan model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi dengan desain Dick Carey. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 31–50. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.32

Nasution, K. S., Ismara, K. I., & Pratama, G. N. I. P. (2026). Faktor implementasi dan integrasi augmented reality dalam pembelajaran: Tinjauan sistematis. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 51–75. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.33

Özden, C., & Kuybulu, E. (2025). Sustainability of social skills course in special education ecosystem: A comprehensive evaluation with CIPP model. *International Journal of Developmental Disabilities*, 1–14. https://doi.org/10.1080/20473869.2025.2525934

Park, K. H., & Yu, J. (2023). Labor market performance gaps and the role of secondary vocational education at meister high school in Korea. *Cogent Education*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2168407

Pratiwi, I., & Iswanto, A. (2026). Navigating support and accountability: Exploring academic supervision and its impact on school teacher performance. *Hamka Insight*, *6*(1), 94–115. https://doi.org/10.51574/hamka.v6i1.98

Prihatiningtias, Y. W., Amirya, M., Putri, I. L. A., Lhutfi, I., & Bin Zakaria, S. B. (2026). Mapping AI literacy among Indonesian junior high school students in a Malaysian Islamic boarding school: An ethical-CIPP evaluation approach. *Cogent Education*, *13*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2026.2710460

Qi, W., & Wu, Y. (2025). Vocational education in service of the construction of the "Belt and Road":

Policy support, development achievements and future outlook. *Chinese Education & Society*, *58*(5–6), 269–285. https://doi.org/10.1080/10611932.2025.2590337

Rocha, A. C., Silva, M., & Duarte, C. (2022). How is sexuality education for adolescents evaluated? A systematic review based on the Context, Input, Process and Product (CIPP) model. *Sex Education*, *22*(2), 198–216. https://doi.org/10.1080/14681811.2021.1908984

Roni, A., Suartini, T., & Suciati. (2026). WebCode apps: Mobile learning peningkat keterampilan pemrograman web statis siswa sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 20–30. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.17

Syarif, M. S., Gantini, S. N., Putra, G. K., & Nkolika, C. J. (2026). Principal instructional leadership as a driver for improving learning quality and outcomes. *Hamka Insight*, *6*(1), 21–42. https://doi.org/10.51574/hamka.v6i1.199

Syarif, M. S., & Sanabria, N. S. (2025). Sustainable leadership as a strategic framework for enhancing school resilience and competitive advantage. *Hamka Insight*, *5*(2), 127–146. https://doi.org/10.51574/hamka.v5i2.137

Syarif, M. S., Shoko, S., & Umi, F. (2025). Adaptive leadership in managing organizational change: Implementing Indonesia's Merdeka Curriculum. *Hamka Insight*, *5*(1), 1–27. https://doi.org/10.51574/hamka.v5i1.162

Tardivo, G., & Fernánde, M. F. (2025). Transforming assessment practice: Evaluating a peer coaching mentoring model in secondary education. *Hamka Insight*, *5*(2), 190–214. https://doi.org/10.51574/hamka.v5i2.116

Weller, J., Fogelgarn, R., & O'Reilly-Briggs, K. (2025). The impact of teacher qualification on vocational schoolteachers' professional identity. *Educational Research*, *67*(4), 504–524. https://doi.org/10.1080/00131881.2025.2558969

Yoana, Auwalin, I., & Rumayya. (2024). The role of vocational education on unemployment in Indonesia. *Cogent Education*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2340858